

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) DI DESA PISANG BEREBUS  
KECAMATAN GUNUNG TOAR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**Desriadi**

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Indonesia  
desriadi03@gmail.com

**Abstrak**

Pembangunan nasional pada dasarnya adalah untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat di seluruh nusantara. Proses pembangunan yang dilakukan secara menyeluruh, terus menerus dan berkesinambungan, pada kenyataannya belum merata pada setiap wilayah. Hal ini disebabkan pembangunan dilakukan secara terpusat dengan pola yang bersifat dari atas ke bawah (top-down). Pola perencanaan pembangunan terpusat (sentralisasi) yang bersifat (top-down) bukanlah suatu perencanaan yang dapat sejalan dengan keinginan masyarakat, karena terdapat kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaannya di lapangan. Pembangunan yang didasarkan atas aspirasi dari bawah keatas (bottom-up) oleh banyak para ahli dipandang lebih efektif dan efisien untuk dilaksanakan pada saat ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa, setiap daerah memiliki kebutuhan dan masalah yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan masing-masing daerah memiliki karakteristik geografis wilayah dan sumber daya yang berbeda. Proses perencanaan pembangunan antara lain melalui langkah – langkah sebagai berikut : 1. Program Politik; 2. Proses Teknokratik; 3. Proses Partisipatif; 4. Proses Bottom Up dan Top Down.

Kata Kunci: perencanaan pembangunan, kesejahteraan.

**Abstract**

*National development is essentially to create the prosperity and well-being for people throughout the archipelago. The development process that is comprehensive, continuous and sustainable, in fact has not been evenly distributed in each region. This is due to the development is done centrally with a pattern that is from top to bottom (top-down). The pattern of centralized development planning (centralized) which is (top-down) is not a planning that can be in line with the wishes of the people, because there are weaknesses in its implementation in the field. Development based on aspiration from the bottom up (bottom-up) by many experts considered more effective and efficient to be implemented at this time. It is undeniable that, each region has needs and different problems. This is due to each geographic area has the characteristics of the region and different resources. The process of development planning, among others through the steps - steps as follows: 1. Political Program; 2. Process Technocratic; 3. Participatory Process; 4. Process Bottom Up and Top Down.*  
*Keywords: development planning, welfare*

## PENDAHULUAN

Administrasi Negara merupakan suatu proses pelaksanaan kebijakan negara. Administrasi negara merupakan suatu proses pengendalian usaha (proses pelaksanaan kegiatan) dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan – tujuan negara. Kemudian administrasi negara juga dapat dikatakan keseluruhan penyelenggaraan kegiatan negara dengan memanfaatkan segala kemampuan aparatur serta segenap dana dan daya demi tercapainya tujuan dan terlaksananya tugas pemerintahan.

Administrasi negara adalah memberikan beberapa definisi berdasarkan empat kategori yaitu : a) Politik, administrasi publik sebagai apa yang dikerjakan pemerintah baik langsung maupun tidak langsung, sebagai suatu tahapan siklus pembuatan kebijakan publik, implementasi kepentingan publik, dan sebagai kegiatan yang dilakukan secara kolektif karena tidak dapat dikerjakan secara individu. b) Legal / Hukum, administrasi publik sebagai penerapan hukum, sebagai regulasi, sebagai pemberian sesuatu dari penguasa kepada rakyatnya. c) Manajerial, administrasi publik adalah fungsi eksekutif dalam pemerintahan, sebagai bentuk spesialisasi dalam manajemen. d) Mata Pencaharian, administrasi publik sebagai suatu bentuk profesi mulai dari tukang sapu sampai ahli sesuatu di sektor publik dimana semua mereka tidak sadar bahwa mereka adalah administrasi publik.

Menurut Nigro (dalam Listyaningsih, 2014 : 3) administrasi negara adalah usaha kerjasama kelompok dalam suatu lingkungan publik, yang mencakup ketiga cabang yaitu yudikatif, legislatif dan eksekutif, mempunyai suatu peran penting dalam memformulasikan kebijakan publik sehingga menjadi bagian dari proses politik.

Hal terpenting dalam administrasi negara yaitu :

*Pertama*, Tujuan; *Kedua*, Kerjasama; *Ketiga*, proses kegiatan; *Keempat*, Sarana. Administrasi negara adalah sebuah proses, artinya terdapat suatu proses kegiatan usaha yang teratur, pengendalian usaha dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi jalannya pencapaian tujuan. Dalam penyelenggaraan administrasi negara dibutuhkan adanya sarana dan prasarana baik dalam bentuk daya maupun dana termasuk juga peralatan untuk menunjang pembangunan termasuk didalamnya infrastruktur dalam menunjang penyelenggaraan negara. Berdasarkan ruang lingkup administrasi negara yang telah dipaparkan di atas maka terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Antara lain; *Pertama*, Rasionalitas, *Kedua*, Efektivitas, *Ketiga*, efisiensi.

Sementara itu administrasi negara menurut Tjokroamidjojo (dalam Listyaningsih, 2014 : 4) memiliki fungsi – fungsi sebagai berikut :

- a. Formulasi / perumusan kebijakan merupakan langkah awal dalam penyelenggaraan negara berupa perumusan kebijakan yang akan dijadikan pedoman negara. Kebijakan yang diambil tergantung dari analisa yang baik atas keadaan – keadaan yang nyata.
- b. Pengaturan / pengendali unsur – unsur administrasi; yang dimaksud unsur – unsur administrasi adalah organisasi dan tata kerjanya, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana. Tugas administrasi adalah mendapatkan, menggunakan dan mengendalikan keempat unsur administrasi tersebut diatas dalam rangka pencapaian tujuan administrasi negara.
- c. Penggunaan dinamika administrasi, yang meliputi : *Pertama*, Pimpinan; *Kedua*, Koordinasi; *Ketiga*, Pengendalian dan pengawasan; *Keempat*, komunikasi.

Pembangunan diartikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara dan bangsa menuju modernitas. Pembangunan juga diarah kepada perubahan paradigma atau mindset masyarakat dari tradisional menuju modern. Intinya bahwa pembangunan merupakan sebuah proses yang harus dilalui sebuah negara dalam rangka pencapaian tujuan negara yang bersangkutan.

Joseph J. Spengler (dalam Listyaningsih 2014 : 44) berpendapat bahwa pembangunan adalah suatu peningkatan kenikmantan. Pembangunan dapat dilihat sebagai ekonomi maupun pembangunan politik. Pembangunan ekonomi adalah kemampuan untuk memanfaatkan sumber – sumber daya alam dalam rangka memenuhi produksi barang dan jasa. Pembangunan politik diartikan sebagai modernisasi politik. Apabila dilihat dari tujuannya, pembangunan politik menuju pada suatu tujuan, misalnya demokrasi, stabilitas, legitimasi, partisipasi dan sebagainya. Sementara itu pembangunan tidak hanya diarahkan pada stabilitas politik saja melainkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Menurut D. Lerner (dalam Listyaningsih, 2014 : 46) modernisasi adalah suatu proses yang sistematis, yang menyangkut perubahan kependudukan, teknologi, ekonomi, politik, komunikasi dan sektor kebudayaan dalam suatu masyarakat. Secara literally modernisasi pada dasarnya menggantikan apa yang ada pada dulunya telah ada untuk dijalankan (ditingkatkan), misalnya pendidikan, industrilisasi, komunikasi, transportasi dan sebagainya. Monte Palmer (dalam Listyaningsih, 2014: 47) melihat modernisasi sebagai suatu proses

menuju suatu bentuk yang ideal dari penyusunan sosial, ekonomi, dan politik. Sementara Diamont (dalam Listyaningsih, 2014 : 47) hanya mengartikan sebagai suatu bentuk perubahan yang datang dari barat (Eropa dan Amerika). Dalam modernisasi selalu terdapat elit modernisasi yang ingin membawa perubahan menuju modernisasi sendiri dapat dilihat melalui peningkatan dari tujuan – tujuan yang ditentukan.

Tujuan pembangunan nasional pada dasarnya adalah untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat di seluruh nusantara. Proses pembangunan yang dilakukan secara menyeluruh, terus menerus dan berkesinambungan, pada kenyataannya belum merata pada setiap wilayah. Hal ini disebabkan pembangunan dilakukan secara terpusat dengan pola yang bersifat dari atas ke bawah (*top-down*). Pola perencanaan pembangunan terpusat (sentralisasi) yang bersifat (*top-down*) bukanlah suatu perencanaan yang dapat sejalan dengan keinginan masyarakat, karena terdapat kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaannya di lapangan. Pembangunan yang didasarkan atas aspirasi dari bawah keatas (*bottom-up*) oleh banyak para ahli dipandang lebih efektif dan efisien untuk dilaksanakan pada saat ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa, setiap daerah memiliki kebutuhan dan masalah yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan masing-masing daerah memiliki karakteristik geografis wilayah dan sumber daya yang berbeda.

Pembangunan tentunya harus dipandang secara logika, yaitu pelaksanaan pembangunan dilakukan secara efektif dan efisien. Efisien dapat diartikan sebagai upaya untuk memperoleh hasil (*output*) yang sama dengan masukan (*input*). Hal ini dapat diterapkan melalui pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat pada umumnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, peran dan partisipasi masyarakat sangat dipandang perlu dalam pelaksanaan pembangunan.

## MANAJEMEN

Menurut Mary Parker Follet (dalam ernie dan kurniawan, 2006 : 5) manajemen adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. *Management is the art of getting things done through people*. Seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat :

1. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia, maupun faktor – faktor produksi lainnya. Sumber daya itu sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan, serta informasi.

2. Adanya proses yang bertahap dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
3. Adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan.

Dalam kehidupan berorganisasi baik organisasi publik maupun privat, dibutuhkan tindakan dalam tatakelola untuk menggerakkan sumber daya yang dimiliki, istilah ini dikenal dengan manajemen yang bertujuan untuk mencapai suatu persamaan arah dalam mencapai suatu tujuan organisasi, adapun pengertian manajemen dapat diuraikan dibawah ini. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengurus, mengelola, menjalankan dan memimpin. Hal ini merupakan suatu konsep atau ide untuk menjalankan kegiatan sehari-hari yang harus dilakukan oleh organisasi.

Menurut Terry (Handyaningrat, 1996: 20), bahwa:

*“Manajemen is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating and controlling, utuliting in each both science and art, and followed in order to accomplish determined objective”*. (Manajemen adalah suatu proses yang membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, pelaksanaan dan pengawasan, dan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya).

Menurut Makmur (2009: 9) menjelaskan konsep tersebut sebagai berikut: Manajemen sebagai suatu konsep pemikiran, tujuan utamanya adalah bagaimana melaksanakan suatu kegiatan yang dimotori oleh manusia dengan menggunakan berbagai pasilitas yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan yang dapat memberikan suatu manfaat dalam kehidupan manusia.

Manajemen menurut Silalahi (2002: 4), “Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengisian staf pemimpin dan pelaksanaan tugas-tugas dalam mencapai tujuan organisasional secara efektif dan secara efisien”. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan organisasi diperlukan kemampuan dari pemerintah/ seseorang untuk mengelola kegiatan pemerintahan/ perusahaan melalui orang lain. Dengan demikian manajemen adalah unsur yang sangat penting dalam sebuah organisasi, yang merupakan motor penggerak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh sebuah organisasi. Berikut penulis jelaskan pengertian konsep pembangunan.

## PERENCANAAN

Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

### Pengertian Perencanaan Partisipatif

Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang melibatkan masyarakat dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi, yang tujuannya untuk memperoleh kondisi yang diharapkan, menciptakan aspirasi dan rasa memiliki. Dalam perencanaan pembangunan yang partisipatif, proses pelaksanaan dari bawah ke atas (*bottom up planning*) di anggap sangat diperlukan dalam pelaksanaannya karena masyarakat tidak hanya dijadikan objek pembangunan melainkan masyarakat itu sendiri terlibat langsung dalam perencanaan pembangunan.

Hal senada juga disampaikan Wijaksono dan Sugiarto (Abe, 2002: 16) bahwa perencanaan pembangunan partisipatif adalah usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat secara mandiri.

### Ciri-Ciri Perencanaan Partisipatif

Menurut Tjokroamidjojo (1995: 34) Perencanaan yang operasional itu adalah:

- 1) Berorientasi pada tujuan;
- 2) Ketepatan waktu;
- 3) Perencanaan harus merupakan kegiatan kontinu dan terus menerus dari formulasi rencana dan pelaksanaannya;

### Perencanaan *Bottom Up Planning* Dan *Top Down Planning*

Wrihatnolo (2011: 7-8) mengatakan bahwa: Dalam perencanaan sentralistik, keseluruhan proses perencanaan suatu negara dibawah badan perencanaan pusat. Badan perencanaan pusat pengendalian setiap aspek pembangunan menetapkan harga semua produk dan upah tenaga kerja. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan desentralistik mengacu pada proses pelaksanaan dari bawah (*bottom up planning*). Rencana pada dasarnya dirumuskan oleh badan perencanaan pusat setelah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan berbagai unit administrasi negara, dengan memperhatikan secara cermat rencana daerah/wilayah. Rencana ditingkat daerah dirumuskan oleh badan perencanaan daerah sesuai dengan potensi dan kondisi daerah serta aspirasi masyarakat.

Tahap-tahap dalam perencanaan *bottom-up* adalah sebagaimana yang digambarkan di atas dapat diterangkan sebagai berikut:

1. Usulan dari masyarakat
  - a. Menyusun usulan proyek yang diusulkan lembaga Perwakilan Masyarakat
  - b. Menyusun usulan proyek berdasarkan forum yang sudah ditentukan untuk tingkat desa
  - c. Menyampaikan usulan proyek yang telah disepakati kepada LMD untuk disyahkan
  - d. Usulan proyek yang telah disyahkan oleh LMD, diajukan oleh Kepala Desa kepada Camat.
2. Proses di Tingkat Kecamatan, membahas suatu usulan proyek yang diterima dari desa-desa setelah diolah oleh Camat/petugas Bangdes Kecamatan.
  - a. Menyusun rencana usulan proyek pembangunan desa wilayah kecamatan berdasarkan forum yang sudah ditentukan untuk tingkat Kecamatan.
  - b. Camat menyampaikan usulan proyek tersebut kepada Bupati/Walikota untuk mendapatkan pengesahan
  - c. Setelah disahkan Bupati/Walikota diimpormasikan kepada Camat kembali, kemudian Camat meneruskan kedesa lokasi program.

Perencanaan partisipatif titik fokusnya adalah keterlibatan masyarakat, bahwa perencanaan partisipatif merupakan perencanaan lahir (*bottom up*) bukan lahir atas (*top down*) atau Pemerintah Daerah jadi perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang disusun dari bawah (*bottom up*). Menurut Abe (2002; 71) langkah-langkah perencanaan di antaranya:

1. Penyelidikan
2. Perumusan Masalah
3. Identifikasi daya dukung
4. Perumusan tujuan

Tujuan adalah kondisi yang hendak dicapai, suatu keadaan yang diinginkan (diharapkan), dan karena itu dilakukan sejumlah upaya untuk mencapainya. Untuk menghasilkan program pembangunan yang efektif, syaratnya adalah sebagai berikut:

- 1) *Transparan*,
- 2) *Responsif*,
- 3) *Partisipatif*,

- 4) *Akuntabel*,
5. Menetapkan langkah-langkah secara rinci
6. Merancang Anggaran

## PEMBANGUNAN

Tujuan dilaksanakan pembangunan pada hakekatnya adalah untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, memperbaiki kehidupan sosial dan kehidupan ekonominya dalam artian tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana fisik semata tetapi lebih kepada perbaikan moral, mental, dan spiritual. Nawawi (2009: 1) berpendapat bahwa: Pembangunan masyarakat merupakan proses perubahan secara sengaja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan banyak dipengaruhi oleh kondisi fisik dan non fisik dari suatu masyarakat sehingga percepatan pembangunan disetiap negara tidak sama.

Dilihat dari pemahaman dan konsep pembangunan yang ada, maka masyarakat dapat beraktivitas dengan keahlian atau kemampuan yang dimiliki untuk dapat berkembang dan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari. Pretty dan Guijt (Nasution: 2009: 17) mengemukakan:

Pendekatan pembangunan partisipatoris harus dimulai dengan orang yang mengetahui sistem kehidupan mereka sendiri. Pendekatan ini harus menilai dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka, dan memberikan sarana yang perlu bagi mereka supaya dapat mengembangkan diri. Ini memerlukan perombakan dalam seluruh praktik dan penilaian disamping bantuan pembangunan.

Selanjutnya Bryant dan White (Mondry, 2006: 28) juga berpendapat bahwa: Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia mempengaruhi masa depannya, teori memiliki lima implikasi utama, meliputi sebagai berikut;

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal baik individu maupun kelompok;
2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan, pemerataan nilai dan kesejahteraan (*equity*);
3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat membangun dirinya sesuai dengan kemampuannya;

4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan pembangunan secara mandiri; Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara satu dengan negara lainnya, menciptakan hubungan saling menguntungkan dan menghormati.

Berdasarkan dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa proses pembangunan dalam melakukan perubahan baik itu perubahan fisik dan non fisik ataupun perubahan akan pola kehidupan masyarakat maka dalam segala bentuk proses pembangunan yang telah dilakukan baik pembangunan dari pemerintah maupun dari pihak swasta pelibatan dari pihak masyarakat ataupun bentuk partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, sehingga masyarakat dapat berkembang dan masyarakat dapat juga menilai akan segala bentuk program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh pihak yang berkepentingan. Berikut akan penulis jelaskan pengertian manajemen pembangunan.

## **PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

Dengan demikian, secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Sedangkan tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera. Arthur W. Lewis (dalam Syafrizal, 2015 : 24) mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif.

Sehingga rangsangan tersebut diberikan dalam bentuk insentif – insentif ekonomi baik secara mikro maupun makro yang dapat mendorong penggunaan sumber daya secara lebih produktif sehingga proses pembangunan akan menjadi lebih meningkat. Kemudian M.L. Jhingan (dalam Syafrizal, 2015 : 25) seorang ahli Perencanaan pembangunan bangsa India memberikan definisi yang lebih konkret tentang perencanaan pembangunan tersebut, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula.

Khusus untuk meluruskan pemahaman dan pelaksanaan perencanaan pembangunan, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai

berikut : “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana – rencana pembanguna jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah”.

## **KONSEP PARTISIPASI MASYARAKAT**

Menurut Davis, Keit dan Newstrom (1985: 140) partisipasi adalah” *Partisipation is defined as mental and emotional involvement of person in group situation that encourage them the contribute to group goals and share responsibility for them*”. Adapun maksud dari teori di atas adalah suatu keterlibatan mental dan emosional seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya.

Menurut Soetrisno (1995: 222) ada dua pengertian partisipasi masyarakat yakni: *Pertama*, partisipasi adalah dukungan masyarakat terhadap rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan tujuannya ditentukan perencana; *Kedua*, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa merupakan suatu prasyarat utama untuk keberhasilan proses pembangunan di pedesaan, namun adanya hambatan-hambatan yang dihadapi dilapangan dalam usaha melaksanakan proses pembangunan yang partisipatif karena pihak perencana dan pelaksana pembangunan (dalam hal ini pemerintah) belum memahami makna sebenarnya dari konsep partisipasi. Definisi partisipasi yang berlaku dilingkungan aparat perencana dan pelaksana pembangunan adalah kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah. Proyek-proyek pembangunan pedesaan yang berasal dari pemerintah diistilahkan sebagai proyek pembangunan yang dibutuhkan masyarakat, sedangkan proyek pembangunan yang diusulkan masyarakat dianggap sebagai keinginan, karena itu proyek ini menjadi prioritas yang rendah dari pemerintah.

Definisi inilah yang berlaku secara universal tentang partisipasi. Oleh karena itu para perencana dan pelaksana pembangunan dalam hal ini pemerintah harus memahami secara benar konsep-konsep untuk mendukung lahirnya partisipasi masyarakat dari bawah. Agar tercapai hasil-hasil pembangunan yang dapat berkelanjutan, banyak kalangan sepakat suatu

partisipasi perlu dilakukan. Masyarakat merupakan paktor penting dalam pembangunan dalam segala bidang, sebab masyarakat merupakan subyek dan sekaligus sasaran pembangunan, sehingga partisipasi masyarakat perlu terus ditingkatkan. Sebelum membahas lebih jauh tentang pengertian partisipasi masyarakat.

Selanjutnya, pada bagian lain Ndraha (1990: 103-107) menyatakan bahwa “partisipasi merupakan suatu tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri”. Kemampuan tersebut dapat ditumbuhkan melalui partisipasi, sebab partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat meningkatkan rasa percaya diri pada kemampuan sendiri (*self reliance*) masyarakat. Rasa ini mendorong tumbuhnya prakarsa dan kegiatan bersama, dan dengan demikian kualitas masyarakat yang mandiri dapat tergerakkan. Kemampuan masyarakat berkembang tatkala yang bersangkutan secara sadar dan bebas memilih dan menyetujui suatu hal, menyerap suatu nilai, atau berkesempatan memutuskan sendiri apa yang dikehendakinya. Jika pembangunan kelembagaan berkaitan dengan proses pengorganisasian masyarakat dalam rangka pemerataan berbagai manfaat pembangunan, dan peningkatan akses masyarakat berkaitan erat dengan kesadaran tanggung jawab masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan.

## **BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT**

Pengertian partisipasi telah disebutkan sebelumnya bahwasanya partisipasi merupakan keikutsertaan , kelompok atau masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Keterlibatan masyarakat tersebut mempunyai beragam bentuk dan jenis partisipasi.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sulaiman (Huraerah. 2008; 103) yang membagi partisipasi kedalam empat macam yaitu:

1. Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka Partisipasi dalam bentuk iuran uang atau barang dalam kegiatan partisipatori, dana, dan sarana sebaiknya datang dari dalam masyarakat sendiri. Kalaupun terpaksa diperlukan dari luar, hanya bersifat sementara dan sebagai umpan
2. Partisipasi dalam bentuk dukungan
3. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan
4. Partisipasi representatif dengan memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil-wakil yang duduk dalam organisasi atau kepanitiaan.

Menurut Hamjoyo dan Iskandar (Huraerah, 2008: 102-103) Mengemukakan jenis-jenis partisipasi yaitu:

- a. Partisipasi buah pikiran;
- b. Partisipasi tenaga;
- c. Partisipasi harta benda;
- d. Partisipasi keterampilan dan kemahiran.

### **MODEL DAN TINGKATAN PARTISIPASI**

Untuk dapat tumbuh dan berkembang, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan memerlukan prasyarat-prasyarat atau elemen-elemen partisipasi. Kotler (Safi'I, 2009: 73) menyebutkan beberapa elemen/prasarat partisipasi yang selau dijumpai dalam setiap pembangunan yaitu tujuan (*cause*), lembaga pengubah (*change agent*), sasaran yang akan diubah (*change target*). Tjokroamidjojo (Safi'I, 2009: 73) membagi partisipasi dalam tiga tahap, yaitu:

1. Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah
2. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan
3. Keterlibatan dalam memetik dan manfaat pembangunan secara berkeadilan.

Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan adalah kesadaran yang tidak bisa muncul dengan sendirinya. Kesadaran tersebut harus dibimbing dan diarahkan sampai mereka bisa mencapai kemandiriannya sendiri.

Selanjutnya menurut Pretty (Adiyoso, 2009: 51) membuat tipologi partisipasi yaitu mulai dari partisipasi pasif, partisipasi informasi, partisipasi melalui konsultasi, partisipasi karena insentif materi, partisipasi fungsional, partisipasi intraktif dan mobilisasi diri.

### **TUJUAN DAN MANFAAT PARTISIPASI**

Tujuan partisipasi masyarakat dapat berubah setiap waktu, tergantung lingkungannya. Menurut Kelly (2001), awalnya partisipasi bertujuan untuk memberikan kekuasaan kepada masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan di negara berkembang. Dalam konteks perkembangannya, meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi hidup masyarakat memaksa mereka untuk memainkan peran penting dalam pembangunan. Sanoff

(2000: 9-10) berpendapat bahwa tujuan utama partisipasi adalah melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memberikan hak suara masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mendorong dan melibatkan masyarakat serta menyatukan tujuan.

Sedangkan menurut Conyers (1994: 154) ada 3 (tiga) alasan mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program-program pembangunan akan gagal.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui rasa memiliki terhadap program tersebut.
3. Merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat itu sendiri

Menurut pendapat Osborne & Gaebler (Muluk. 2007:23) mengungkapkan bahwa: partisipasi masyarakat biasanya memberikan jauh lebih banyak solusi terhadap masalahnya dibandingkan pelayanan publik profesional pada umumnya. Pada dasarnya partisipasi masyarakat dapat memberikan solusi terhadap apa yang dibutuhkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Karena adanya partisipasi tersebut pemerintah akan dapat mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan masyarakat.

Selanjutnya Slamet (dalam Adiyoso, 2009: 54) mengemukakan bahwa yang mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi adanya kemauan, kemampuan dan kesempatan.

#### 1. Kemauan

Merupakan suatu dorongan atau hasrat yang muncul dari diri sendiri untuk melakukan suatu aktifitas. Terkait dengan hal perencanaan pembangunan, maka kemauan yang dimaksud oleh penulis di asumsikan sebagai keinginan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan (Musrenbangdes).

#### 2. Kemampuan

Merupakan suatu kondisi yang memungkinkan seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan dilihat dari banyak faktor disesuaikan dengan permasalahannya. Misalnya dalam perencanaan pembangunan. Kemampuan ini dapat di lihat dari segi kesehatan secara fisik maupun mental.

### 3. Kesempatan

Merupakan peluang yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Jadi kesempatan dikaitkan dengan tema penelitian yang dilakukan penulis merupakan faktor pendukung timbulnya partisipasi yang dapat dikatakan lebih berasal dari luar.

Kemauan dan kemampuan berpartisipasi berasal dari yang bersangkutan (warga atau kelompok masyarakat), sedangkan kesempatan berpartisipasi datang dari pihak luar yang memberi kesempatan. Apabila ada kemauan tapi tidak ada kemampuan dari masyarakat, meskipun telah diberi kesempatan oleh negara atau penyelenggara pemerintahan, maka partisipasi tidak akan terjadi. Demikian juga jika ada kemauan dan kemampuan tetapi tidak ada ruang atau kesempatan yang diberi oleh negara atau penyelenggara pemerintahan untuk warga atau kelompok dari suatu masyarakat.

Pendapat di atas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi diantaranya kemauan dari masyarakat itu sendiri, kemampuan dan kesempatan dalam suatu kegiatan organisasi.

## METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan menggunakan wawancara dan observasi serta dari dokumentasi yang ada. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.

Teknik Penarikan sampel yang digunakan dengan teknik *Purposive Sampling*. Teknik *Sampling Purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dan untuk masyarakat menggunakan *Snowball Sampling* artinya penarikan sampel dengan mencari informasi dari sedikit hingga mendapatkan informasi yang sebanyak-banyak, dengan tujuan data yang didapatkan menjadi lebih akurat dan benar – benar valid. Dalam implementasinya dengan wawancara dan observasi.

Analisis menggunakan analisis deskriptif, artinya melalui teknik ini maka dapat menggambarkan seluruh data dan fakta yang diperoleh dengan mengembangkan kategori – kategori yang relevan dengan tujuan penelitian dan penafsiran terhadap hasil deskriptif dengan berpedoman pada teori – teori yang sesuai.

## PEMBAHASAN

### FAKTOR PENGHAMBAT PARTISIPASI MASYARAKAT

Dalam relisasinya pelaksanaan rencana Musrenbang tentunya banyak mengalami kendala-kendala di lapangan, yang dapat menyebabkan suatu rumusan tidak lagi berdasarkan pada aspirasi masyarakat hal ini dapat kita ketahui melalui pendapat beberapa pakar dibawah ini.

Bratakusumah (2004: 349-350), adanya beberapa hal yang menjadi faktor penghambat perencanaan pembangunan di daerah, yaitu: *Kendala Politis, Sosio ekonomi, dan Budaya/kultur.*

Berdasarkan pendapat di atas bahwa faktor penghambat partisipasi masyarakat dapat disebabkan oleh berbagai banyak hal diantaranya, kendala politik, sosial ekonomi, budaya/kultur dan faktor interen yang berasal dari masyarakat itu sendiri.

Pendapat lain menyebutkan Plummer (Adiyoso: 119) mengatakan bahwa faktor pendidikan dapat menghambat keikutsertaan masyarakat. Karena sebagian besar masyarakat desa berpendidikan rendah bahkan banyak yang tidak pernah sekolah. Sehingga kondisi ini bisa menyebabkan penyebaran informasi tergantung komunikasi lisan daripada komunikasi tertulis. Kemampuan membaca tidak hanya mempengaruhi pemahaman akan rencana pembangunan di masyarakat, tapi juga dapat mempengaruhi pemilihan strategi yang digunakan untuk mendorong partisipasi. Penyebaran informasi dan komunikasi lebih mudah bagi masyarakat-masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan lebih tinggi dan yang bisa membaca

Menurut Putnam (Taylor, 2003: 42) Faktor lain yang berkaitan dengan perubahan budaya adalah:

Ikatan sosial dan pengaruh lingkungan luar, ketiadaan hal timbal balik dan kerjasama dalam kelompok mencerminkan lemahnya ikatan sosial di masyarakat. Masyarakat kini lebih individualis. Kecendrungan ke individualisme yang dialami masyarakat pedesaan di Indonesia konsisten dengan kecendrungan masyarakat dunia ke arah globalisasi.

Faktor lain yang menghambat partisipasi menurut pendapat Taylor (2003: 133) adalah:

Keterwakilan masyarakat . Meskipun para pemimpin informal ‘dipilih’ mewakili kepentingan masyarakat umum, pada kenyataannya mereka jarang berinteraksi dengan masyarakat umum. Sudah jamak karena mereka menghabiskan sumber daya dan dana untuk masyarakat yang

mereka wakili, maka dalam banyak kasus keputusan-keputusan mereka tidak mencerminkan kepentingan masyarakat luas

Berdasarkan ketiga pendapat di atas beberapa faktor penghambat masyarakat dalam keikutsertaanya dalam perencanaan pembangunan, hal tersebut tidak hanya diakibatkan oleh faktor interen masyarakat, akan tetapi ada yang berasal di luar diantaranya adanya kendala politis, sosio ekonomi, serta faktor budaya/ kultur masyarakat yang memang secara tidak langsung mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

### **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN**

Mengingat pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, untuk itu pemerintah sudah seharusnya menciptakan mekanisme untuk memperbaiki kualitas dan kesempatan masyarakat dalam keikutsertaanya tersebut, sesuai dengan beberapa pendapat para ahli berikut ini:

Menurut Soetrisno (1995: 222) ada dua pengertian partisipasi masyarakat yakni:

*Pertama*, partisipasi adalah dukungan masyarakat terhadap rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan tujuannya ditentukan perencana; *Kedua*, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai.

Partisipasi masyarakat tidaklah semata-mata berarti melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan, proses, kewenangan, metode/cara, serta pengawasan terhadap program yang telah disepakati, akan tetapi lebih kepada sasaran yang hendak dicapai lewat program rencana yang telah direncanakan sehingga kedepanya pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna dapat diwujudkan ditengah-tengah masyarakat. Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan salah satu wadah yang sudah dikenal oleh masyarakat adalah melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), berikut akan dijelaskan pengertian dari Musrenbang.

### **MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) PENGERTIAN MUSRENBANG**

Perencanaan pembangunan yang biasa disingkat Musrenbang, menurut UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah forum

antara pelaku kepentingan dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Nasional (RPN) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), musrenbang adalah mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat *bottom-up*. Dengan mekanisme ini diharapkan adanya keterlibatan masyarakat sejak awal dalam proses pembangunan.

Musrenbang ini dilakukan secara bertingkat mulai dari tingkat kelurahan/desa, kecamatan, kota, provinsi sampai nasional. Fungsi musrenbang ini adalah wadah silaturahmi antara masyarakat dengan pemerintah, antara masyarakat dengan *stakeholder* pembangunan lainnya.

### **MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES)**

Musrenbang kelurahan/desa adalah forum musyawarah *stake holders* kelurahan/desa (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan kelurahan/desannya dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati hasil musyawarah untuk rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. Menurut surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara dan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri. Musrenbang Desa/Kelurahan diselenggarakan dengan tujuan antara lain sebagai berikut:

- 1) Menyepakati prioritas kebutuhan dan kegiatan yang termasuk urusan pembangunan yang menjai wewenang kelurahan yang menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja SKPD kelurahan.
- 2) Prioritas kegiatan kelurahan yang akan dilaksanakan oleh warga kelurahan yang dibiayai melalui dana swadaya masyarakat dan koordinasikan oleh lembaga kemasyarakatan dan kelurahan setempat
- 3) Prioritas kegiatan kelurahan yang akan dilaksanakan kelurahan sendiri yang dibiayai melalui dana bantuan dari pemerintah daerah (kabupaten/kota)
- 4) Prioritas kegiatan kelurahan yang akan dilusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD kabupaten /kota atau APBD propinsi.
- 5) Menyepakati Tim Delegasi kelurahan yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada dikelurahannya diforum musrenbang kecamatan untuk menyusun program pemerintah daerah/SKPD/OPD tahun berikutnya.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat dikatakan bahwa tujuan musrenbangdes adalah penetapan usulan dari masyarakat sebagai prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja SKPD/OPD kelurahan serta mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

Mekanisme pelaksanaan musrenbang kelurahan/desa terdiri dari tahapan:

- 1) Tahap Persiapan , dengan kegiatan sebagai berikut:
  - a) Masyarakat ditingkat Dusun/RW dan kelompok-kelompok masyarakat (seperti misalnya kelompok tani, kelompok nelayan, tokoh adat, tokoh pemuda dan lain-lain) melakukan musyawarah.
  - b) Kepala Desa/Lurah menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kelurahan/desa
  - c) Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut.
- 2) Pendaftaran peserta
  - a) Pemaparan Camat atas prioritas kegiatan pembangunan di kecamatan yang bersangkutan.
  - b) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta musrenbang kelurahan/desa.
  - c) Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk musrenbang kelurahan/desa
- 3) Tahap Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut:
  - a) Pemaparan Camat atas prioritas Camat atas hasil evaluasi pembanguna tahun sebelumnya, dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis pada tahun sebelumnya. Pemaparan Kepala Desa/Lurah atas prioritas program/kegiatan untuk tahun berikutnya. Pemaparan ini bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Kelurahan oleh Kepala Desa/Kelurahan.
  - b) Penjelasan Kepala Desa tentang informasi tentang perkiraan jumlah Alokasi Dana Desa (ADD)
  - c) Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat kelurahan/desa oleh beberapa perwakilan dari masyarakat. Misal: Ketua kelompok tani, komite sekolah, kepala dusun, dan lain-lain.

- d) Pemisahan kegiatan berdasarkan : a) kegiatan yang akan diselenggarakan sendiri ditingkat desa/kelurahan, dan b) kegiatan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibahas dalam musrenbang tahunan kecamatan.
- e) Perumusan para peserta tentang prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta.
- f) Penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan kelurahan/desa adalah Dokumen Rencana Kerja Pembangunan desa/kelurahan yang berisi:
  - 1. Daftar prioritas kegiatan urusan pembangunan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD kelurahan.
  - 2. Daftar prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan secara swadaya.
  - 3. Daftar permasalahan prioritas yang akan diajukan pada musrenbang kecamatan.
  - 4. Daftar nama tingkat delegasi kelurahan yang akan mengikuti musrenbang kecamatan.
  - 5. Berita acara musrenbang kelurahan.

#### 4) Keluaran

Keluaran dari kegiatan musrenbangdes adalah:

- a. Prioritas rencana kerja pembangunan desa/kelurahan yang berisi: prioritas kegiatan pembangunan skala desa/kelurahan yang akan didanai oleh alokasi dana desa dan atau swadaya. Prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui satuan kerja perangkat daerah yang dilengkapi dengan kode desa/ kelurahan dan kecamatan dan akan dibahas pada forum musrenbang kecamatan.
- b. Daftar nama delegasi untuk mengikuti musrenbang kecamatan
- c. Berita acara musrenbang desa/ kelurahan.

Peserta Musrenbang kelurahan/desa adalah komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada kelurahan/desa, seperti: Ketua RT/RW, Kepala Dusun, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), ketua adat, kelompok perempuan, kelompok pemuda, organisasi masyarakat, pengusaha, kelompok tani/nelayan, komite sekolah dan lain-lain.

Narasumber dalam pelaksanaan Musrenbang kelurahan/desa adalah Kepala Desa/Lurah, Anggota BPD, Camat dan aparat kecamatan, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, Pejabat instansi yang ada di desa, dan LSM yang bekerja di desa yang bersangkutan.

Menurut Surat Edaran penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan/desa dari Dirjen Bina Marga-Departemen Dalam Negeri No. 118/M.PPN/02/2006.050/224/SJ, Tanggal 14 Pebruari 2006 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Musrenbang. Terdapat prinsip-prinsip dalam pelaksanaan musrenbang kelurahan/desa, berlaku baik untuk pemandu, peserta, narasumber, maupun semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan musrenbang kelurahan/desa.

1. Prinsip Kesetaraan. Peserta musyawarah adalah warga desa dengan hak yang setara untuk menyampaikan pendapat, berbicara dan dihargai meskipun terjadi perbedaan pendapat. Sebaliknya juga memiliki kewajiban yang setara untuk mendengarkan pandangan orang lain, menghargai perbedaan
2. Pendapat, dan menjunjung tinggi (menghormati) hasil keputusan forum meskipun kita sendiri tidak sependapat.
3. Prinsip Musyawarah Dialogis. Peserta Musrenbang desa/kelurahan memiliki keberagaman tingkat pendidikan, latar belakang. Kelompok usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi, dan sebagainya. Perbedaan dan berbagai sudut pandang tersebut diharapkan menghasilkan keputusan terbaik bagi kepentingan masyarakat banyak dan desa di atas kepentingan individu dan golongan.
4. Prinsip Anti Dominasi. Dalam musyawarah, tidak boleh ada individu atau kelompok yang mendominasi sehingga keputusan-keputusan yang buat tidak lagi melalui proses musyawarah semua komponen masyarakat secara seimbang.
5. Prinsip Keberpihakan. Dalam proses musyawarah, dilakukan upaya untuk mendorong individu dan kelompok yang paling “diam” untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya, terutama kelompok miskin, perempuan dan generasi muda.
6. Prinsip Anti Diskriminasi. Semua warga desa memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjadi peserta musrenbang. Kelompok marjinal dan perempuan, juga punya hak untuk menyampaikan pendapat dan pikirannya dan tidak boleh dibedakan.
7. Prinsip Pembangunan Desa Secara Holistik. Musrenbang kelurahan/desa dimaksudkan untuk menyusun rencana pembangunan desa, bukan rencana kegiatan kelompok atau sektor tertentu saja. Musrenbang kelurahan/desa dilakukan sebagai upaya mendorong kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan desa secara utuh dan menyeluruh sehingga tidak boleh muncul ego sektor dan ego wilayah dalam menentukan prioritas kegiatan pembangunan yang berada di desa.

## KESIMPULAN

1. Bentuk partisipasi: kehadiran masyarakat pada rapat dalam perencanaan pembangunan desa masih rendah. Pemberian ide dan gagasan oleh masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa masih rendah sehingga hasil keputusan kegiatan program pembangunan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa berupa fisik/tenaga seperti mempersiapkan tempat rapat berupa penataan ruangan rapat, pengaturan meja dan kursi rapat masih rendah.
2. Kewenangan Pengambilan Keputusan: Keputusan mengenai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan lebih banyak ditentukan oleh pemerintah desa dan fasilitator kecamatan, sedangkan keterlibatan masyarakat masih rendah. Kondisi ini dikarenakan masyarakat Desa Pisang Berebus kurang mampu dalam mengidentifikasi prioritas kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Selain itu, ide dan gagasan yang disampaikan oleh tokoh masyarakat, Kepala Dusun hanya sekedar ditampung saja, tanpa ada realisasi dalam penentuan kegiatan pembangunan desa yang akan dilaksanakan. Kurangnya penyampaian ide dan gagasan dari masyarakat dikarenakan terbatasnya forum dalam menampung usulan masyarakat.
3. Metode/Cara Pemberian Usulan: Partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi/usulan yang akan disampaikan pada forum rapat dusun masih rendah. Metode dalam mengusulkan program melalui forum rapat tingkat dusun tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh Kepala Dusun dan masyarakat di Desa Pisang Berebus. Partisipasi masyarakat dalam mengajukan usulan program pembangunan desa melalui bentuk tulisan seperti pembuatan proposal belum berjalan dengan baik, dimana masyarakat kesulitan untuk membuat proposal tersebut, karena kurangnya pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam membuatnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abe, Alexander. (2002). *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Solo: Pondok Edukasi.
- Adiyoso, Wingnyo. (2009). *Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Surabaya: ITS Press
- Conyers, Diana. (1994). *Perencanaan sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: UGM Press
- Sule, Erni Tisnawati dan Kurniawan Saefullah. (2006). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenada Media.
- Huraerah, Abu. (2008). *Pengorganisasian dan pengembangan Masyarakat; Model dan strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Listyaningsih. (2014). *Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Makmur. (2009). *Teori manajemen Stratejik*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Muluk, Khairul. (2007). *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah: sebuah kajian dengan pendekatan berfikir sitem*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ndraha, Talizuduhu. (1990). *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Nawawi, Ismail. (2009). *Pembangunan dan Problema Masyarakat*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
- Nasution, Zulkarnaen. (2009). *Solidaritas dan Partisipasi Masyarakat desa Transisi (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Malang: UMM Press.
- Riyadi, Bratakusumah dan Deddy Supriady. (2004). *Perencanaan Pembangunan daerah, Strategi Menggali potensi dam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Sanoff, H. (2000). *Community Participation methods in design and planning*. Brisbane: Jhon Wiley & Sons, Inc.
- Syafrizal. (2015). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Taylor, M. (2003). *Public policy in the commudity*. New York: Palgrave Macmillan
- Tjokroamidjojo, Bintaro. (1995). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004. Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Surat Edaran Bersama Bappenas-Depagri Tahun 2007 Tentang Teknis khusus Penyelenggaraan Musrenbang.

Surat Edaran Bersama Dirjen Bina Marga-Departemen Dalam Negeri No. 118/M.PPN/02/2006.050/224/SJ, Tanggal 14 Pebruari 2006 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Musrenbang.

Depdagri, *Ditjen PMD, 1994. Panduan Operasional Pembangunan Desa*. Jakarta: PT. Penebar Swadaya.

Perda Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Perencanaan, pelaksanaan, Pembangunan dan pemanfaatan serta Pendayagunaan Kawasan Pedesaan. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 1996. *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD) Jilid 1-III* Jakarta: Dirjen PMD.

Perda Kabupaten Kuantan Singngi Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa.